

**MIGRASI INTERNASIONAL PEREMPUAN  
DAN PENGUASAAN LAHAN PEDESAAN DI JAWA BARAT:  
Antara Resiko Dan Penggunaan Remitan<sup>1</sup>**

**Oleh : Muhammad Zid<sup>2</sup>,  
Ekawati Sri Wahyuni<sup>3</sup>, Lala M. Kolopaking<sup>4</sup>, Endriatmo Soetarto<sup>5</sup>**

**ABSTRACT**

*This paper is a result of a research on women in Panyingkiran Village (Karawang) and Ciherang Village (Purwakarta) of West Java-Indonesia who migrate internationally. Paradigm used in this research is Post-Positivism which integrates quantitative and qualitative methods. Primary data is collected through in depth interview and Focus Group Discussion. The result of the research shows that most of female migrants spend remittent from working in Saudi to buy land (dry land and paddy rice fields) of relatively small in size. Land is an interesting choice because: (1) female migrants come from poor families which are the lowest class in rural areas; (2) the livelihood of female migrants' families are farm labors and landless farmers; (3) occupations of migrants before going abroad are farm labors, jobless and as house wife; (4) farm land is a social status symbol for rural communities; (5) land is a saving and land ownership is also a capital when one dies, and becomes a standard in the ritual of death ngamumule or mulasara.*

*Key Words: Women, international migrant, rural.*

---

<sup>1</sup> Makalah adalah bagian dari disertasi penulis pertama, Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor

<sup>3</sup> Ketua Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB

<sup>4</sup> Anggota Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB

<sup>5</sup> Anggota Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB

## I. PENDAHULUAN

Migrasi internasional didefinisikan sebagai suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya (Zlotnik, 1992; Appleyard, 1989 dalam Haris 2002). Pengertian yang lebih luas dari Lee, (1980); Bogue, (1969); Bedford, (1981) mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi maupun keinginan-keinginan menetap atau tidak menetap di daerah tujuan. Sedangkan PBB melihat migrasi dari konteks pelaku atau migran. Menurut PBB, migran internasional adalah seseorang yang tinggal di luar negara asal tempat tinggalnya selama periode sekurang-kurangnya satu tahun.

Berdasarkan definisi tersebut, PBB menaksir pada tahun 2005 ada sekitar 200 juta migran internasional di seluruh dunia, termasuk sekitar 9 juta diantaranya pengungsi (Kosser, 2009). Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi internasional asal Indonesia dan negara berkembang Asia lainnya adalah negara kaya dan maju di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan.

Satu hal yang menarik bahwa migrasi tenaga kerja internasional saat ini di dominasi oleh buruh migran perempuan atau apa yang sering dinamakan feminisasi migrasi. Krisis ekonomi di Indonesia yang diikuti rentetan krisis lainnya pada tahun 1997-1998 menjadi faktor penyebab bertambahnya jumlah perempuan yang bekerja ke luar negeri. Pada periode 1995-1996 terdapat 48 migran laki-laki dari setiap 100 migran perempuan, maka pada periode 1997-1998 terdapat rasio 20 laki-laki dari setiap 100 buruh migran perempuan (Hugo, 2000). Data terbaru tahun 2007-2009 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2007 terdapat 543.859 orang atau sekitar 78 persen perempuan bekerja di luar negeri, migran laki-laki sebanyak 152.887 orang atau hanya 22 persen, pada tahun 2008 terdapat 482.076 orang atau turun sekitar 64 persen, migran laki-laki 266.749 orang, dan pada tahun 2009 terdapat kenaikan yang tinggi yaitu 528.254 orang migran perempuan atau 83,56 persen, sedangkan migran laki-laki hanya 103.918 orang atau sekitar 16,44 persen yang bekerja di luar negeri (Sumber: BNP2TKI dan Ditjen Binapenta, Diolah Pusdatinaker : 2010). Tingginya permintaan terhadap tenaga kerja perempuan dari negara-negara kaya menyebabkan beberapa kabupaten dan kota

di Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Sukabumi sejak lama dikenal sebagai *enclave* pengirim migran perempuan.

Tulisan ini mencoba mengkaji secara teoritis migrasi internasional perempuan dan secara empirik mengungkapkan hasil penelitian di Desa Panyingkiran dan Ciherang Jawa Barat yang memiliki banyak perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi dan membelanjakan sebagian dari remiten ke dalam pembelian lahan berupa tanah darat dan sawah.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Migrasi Internasional: Aras Mikro-Messo dan Makro

Sebagai sebuah gerak penduduk antar wilayah negara, migrasi internasional memiliki berbagai dimensi yang terkait dengan kepentingan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Meskipun pada awalnya migrasi selalu dikaitkan dengan motif ekonomi yaitu upaya seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan terhadap makanan, pakaian, dan rumah yang layak huni, saat ini pemaknaan terhadap migrasi internasional selalu terkait dengan ranah sosiologis,

politik, keamanan, kultur, *networking*, keamanan, dan keagamaan.

Teori migrasi bermula dari karya Ravenstein (1885), dalam perkembangannya menjadi dasar bagi karya-karya ilmuwan migrasi lainnya seperti Lee dan Zelinsky khususnya dalam hal penekanan aspek motif ekonomi sebagai penyebab terjadinya migrasi. Dari sudut ilmu ekonomi, teori migrasi diemukakan oleh Lewis (1954) dan kemudian dikembangkan oleh Fei dan Ranis (1961), menganggap bahwa migrasi sebagai "*ecquilibrating mechanism*" yang menjurus kepada keseimbangan antara sektor subsisten dengan sektor modern. Ravenstein menggagas tujuh hukum terjadinya migrasi yaitu: (1) arus migrasi terbesar umumnya berjarak pendek; (2) migrasi terjadi secara bertahap dari desa-ke kota kecil-kota besar; (3) setiap proses dispersi adalah kebalikan dari proses absorpsi secara sama; (4) setiap arus migrasi masuk dikompensasi oleh arus migrasi keluar; (5) migran jarak jauh umumnya menuju pusat-pusat perdagangan dan industri; (6) penduduk kota kecil kurang migratori dibandingkan dengan penduduk desa, (7) perempuan lebih migratori dibandingkan dengan laki-laki (Ravenstein, 1885; Rauchber, 1893; Lee, 1995; dan Ekawati, 2007).

Teori neoklasik ekonomi mikro membicarakan pengambilan keputusan di tingkat individu migran, tetapi tidak mencoba menjelaskan persoalan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu, mengapa bukan dengan cara lain. Teori ini hanya merekomendasikan kepada para migran potensial, agar mempertimbangkan 'cost and benefit' dari setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah asal migran (Massey, 1993; dan Kuper and Kuper, 2000).

Todaro (1998) menyatakan migrasi merupakan suatu proses selektif yang mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah; 1) faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan diri dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka; 2) faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis seperti banjir dan kekeringan; 3) faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang

kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat; 4) faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi; 4) faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Pendekatan *The new economics of migration of theory* dari Massey (1993) menganggap bahwa migrasi sebagai pilihan kelompok atau keluarga sebagai salah satu cara untuk mengurangi resiko. Kepala keluarga akan membiayai anggota keluarga yang melakukan migrasi dan biaya hidup selama dia mencari pekerjaan. Sementara itu migran mempunyai komitmen untuk mengirim uang kepada keluarga, apalagi pada saat keluarga mengalami kesulitan seperti mengalami kegagalan panen. Pandangan Massey sejalan dengan Ellis (1988) dan Owusu (2007) yang berpendapat bahwa migrasi – di dalam maupun keluar negeri – merupakan *survival strategy* dan *copyng strategy* yang biasa dilakukan keluarga miskin di pedesaan.

Selanjutnya Massey (1990b) mengemukakan teori *cumulative*

*causation*, yang menjelaskan bahwa migrasi internasional karena adanya pertumbuhan jejaring dan perkembangan berbagai lembaga pendukung. Migrasi internasional akan tetap terjadi karena adanya apa yang disebut Gunar Myrdal sebagai “*cumulative causation*” (Myrdal, 1957; Massey, 1990b).

Kausalitas migrasi yang dimaksud merupakan akumulasi berbagai faktor yang mendorong setiap keputusan migrasi dalam konteks sosial migrasi. Paling tidak terdapat enam faktor potensial yang secara kumulatif dapat dipengaruhi oleh aktivitas migrasi internasional yang terjadi, yaitu: (1) distribusi pendapatan; (2) distribusi lahan; (3) organisasi produksi pertanian; (4) kebudayaan; (5) distribusi regional dari sumberdaya manusia; dan (6) pelabelan sosial.

Teori neoklasik ekonomi makro dari Wood (1982), menjelaskan bahwa perpindahan tenaga kerja terjadi dari negara yang mengalami surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki surplus kapital. Lee (1995) mengungkapkan bahwa faktor yang melatarbelakangi migrasi tenaga kerja ke daerah tujuan adalah faktor makro yang lebih dikenal dengan daya tarik (*pull*

*factor*) di daerah tujuan dan daya dorong (*pull factor*) dari daerah asal.

Sampai saat ini, motif ekonomi dipandang sebagai faktor pendorong utama bagi seseorang untuk melakukan mobilitas (Lewis, 1954; Ranis & Fei, 1961; Todaro, 1979; Titus, 1985; Lee, 1992). Seseorang melakukan mobilitas disebabkan oleh adanya motivasi tertentu, ketimpangan perkembangan ekonomi antar daerah, secara rasional akan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas, dengan harapan di daerah baru akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Piore (1979) terkenal dengan teori *Segmented Labour Market* berpendapat bahwa arus migrasi tenaga kerja dari suatu negara ditentukan faktor permintaan (*demand*) pasar kerja yang lebih tinggi di negara lain. Faktor penarik (*pull factor*) berupa pasar kerja jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor penekan lain untuk berpindah (*push factor*) yang ada di daerah asal.

Tjiptoherijanto (1977), berpendapat bahwa migrasi internasional berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya yang tinggi, sangat tidak

mungkin aktivitas perekonomian negara tersebut dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Dengan demikian, pengiriman tenaga kerja merupakan suatu pemecahan masalah ketenagakerjaan. Dalam teori ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, hal ini sering dinyatakan sebagai *“the first stage of labor migration transition”* .

## 2.2. Jender dan Penguasaan Lahan di Pedesaan

Secara sederhana, jender dapat diartikan sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat (Djohani, 1996). Jender dibedakan dengan jenis kelamin (Mosse, 1996).

Sebagai sebuah konstruksi sosial, jender terkait erat dan selalu berbeda pada setiap masyarakat, dan peran jender dipengaruhi oleh kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Pada aras keluarga, peran jender antara lain akan terlihat dalam hal pembagian kerja antara suami-istri, peran anak laki-laki dengan anak perempuan, “siapa memutuskan apa”, akses terhadap sumberdaya (termasuk

lahan) dan mengatur bagaimana cara-cara berhubungan dengan pihak luar.

Akses perempuan Indonesia terhadap lahan pertanian sangat terlihat setelah penerapan revolusi hijau, dimana perempuan semakin termarginalkan dari hak-hak dan akses terhadap layanan pertanian, termasuk penyuluhan, input produksi dan kredit (White dan Wiradi, 2009). Misalnya dalam hal mendapatkan kredit, perempuan seringkali menderita ganda, yaitu ada diskriminasi langsung berdasarkan jenis kelamin, dan diskriminasi tidak langsung berdasarkan fakta bahwa perempuan cenderung tidak memiliki hak atas tanah keluarga yang didaftar atas nama mereka.

Studi Stoler (1977) mencoba menggabungkan analisis jender dan kelas. Stoler menunjukkan bahwa tipe tenaga kerja, pengaturan tenaga kerja, dan kesempatan pendapatan akan sangat bervariasi antara suatu rumah tangga kaya, rumah tangga miskin, dan rumah tangga tanpa tanah. Sementara itu, Boserup (1970), Dove (1980) meneliti peran serta perempuan pada masyarakat ladang berpindah. Menurut mereka, akses perempuan terhadap lahan dan proses produksi pertanian sangat tinggi, mulai proses penanaman bibit, menyiangi, memanen. Sedangkan Moore (1988)

meneliti masyarakat Dayak Kantu yang memiliki status sejajar dengan laki-laki sebagai akibat komoditi tanaman karet dan akses perempuan sebagai pewaris tanah orang tua mereka.

Studi Savitri dan Fremerey (2008) tentang pergeseran peran dan akses perempuan petani Bolapapu di Sekitar Kawasan Taman Nasional Lore-Lindu pasca dikenalkannya tanaman kakao yang berorientasi komersial ekspor telah memarginalkan tenaga kerja perempuan. Kontrol dan akses perempuan yang relatif dominan dalam pertanian padi yang memiliki “wajah” pengetahuan perempuan tergeser dengan masuknya tanaman kakao yang menyebabkan kontrol dan akses laki-laki begitu dominan. Dominasi dan akses laki-laki terlihat sejak menentukan penanaman, perekrutan tenaga kerja, pemupukan, sampai pemanenan. Perempuan hanya terlibat dalam pemanenan, pengeringan dan pemasaran.

### **2.3. Ketimpangan Penguasaan Lahan**

Ketimpangan penguasaan lahan di Pulau Jawa, Madura dan Bali umumnya, dan di pedesaan Jawa Barat telah terjadi jauh sebelum adanya penguasa asing masuk ke Indonesia (Huskens dan White 1989). Data Sensus Pertanian Tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993 memperlihatkan

pengurangan luas tanah garapan. Misalnya pada tahun 1963 jumlah petani 7,95 juta, rata-rata penguasaan tanah 0,71 ha, Tahun 1973 terdapat 8.27 juta petani dengan rata-rata penguasaan tanah 0,60 ha, pada tahun 1983 terdapat 10,27 juta petani dengan rata-rata penguasaan tanah hanya 0.30 ha. Sensus Pertanian tahun 1993 menunjukkan angka ketimpangan yang cukup tajam, dimana jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian naik menjadi 15,4 juta jiwa, yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 ha sebanyak 6,5 juta jiwa, yang memiliki tanah sangat sempit, sehingga harus mencari makan di luar pertanian sebanyak 1,6 juta jiwa, dan buruh tani penuh 2,6 juta jiwa (Bachriadi, Faryadi, Setiawan 1997).

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa pemilikan tanah rata-rata petani sekitar 0,5 hektar atau bahkan lebih kecil lagi. Keluarga petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar saat ini mencapai 56,5 persen dari total keluarga petani yang saat ini berjumlah sekitar 25 juta keluarga (Winoto, 2009). Dengan distribusi tanah yang timpang, banyak masalah yang muncul di berbagai wilayah berupa konflik sengketa tanah yang terjadi antara individu, keluarga dan konflik yang terjadi antara penduduk di suatu kawasan dengan

pihak kehutanan, perkebunan milik perusahaan swasta, dan pemerintah.

Ketimpangan pemilikan lahan ada masa Orde Baru sebagai akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan penduduk tunakisma (*landlessness*) semakin meningkat jumlahnya (Kutanegara, 2002), ditambah penerapan revolusi hijau yang dilaksanakan melalui program Bimas dan Inmas serta didukung dengan mekanisasi pertanian, yang hanya menguntungkan kelas pemilik tanah (Husken, 1989; Husken dan White, 1989). Mahalnya biaya produksi pertanian mengakibatkan petani dengan lahan sempit tidak mampu membiayai produksi pertanian, dan menjual lahan mereka kepada golongan petani kaya. Maka terjadilah proses akumulasi pemilikan tanah pada segelintir orang kaya di pedesaan.

Akumulasi penguasaan dan pemilikan lahan di pedesaan kepada segelintir warga desa yang kaya menghilangkan peluang kerja bagi penduduk --laki-laki maupun perempuan-- yang tidak memiliki lahan dan kemudian “memaksa” mereka meninggalkan daerah asalnya menuju ke perkotaan bahkan bekerja ke luar negeri dengan bekal keterampilan yang tidak memadai. Dengan pendidikan dan

keterampilan yang rendah, tenaga kerja laki-laki terserap dalam sektor perkebunan (di Malaysia), konstruksi bangunan, dan pengemudi, sedangkan perempuan hanya menjadi pembantu rumah tangga (PRT).

#### **2.4. Migrasi Internasional Perempuan dan Penguasaan Lahan Pedesaan di Jawa Barat**

Hasil penelitian penulis tahun 2009-2011 di Desa Panyingkiran Karawang dan Desa Ciherang Purwakarta, menunjukkan bahwa dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Arab Saudi terbukti mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga migran perempuan di kedua desa tersebut. Mereka mampu merenovasi dan membangun rumah tembok, membeli kendaraan roda dua, bahkan mampu menggadai, menyewa dan membeli lahan (tanah darat dan sawah). Hasil jerih payah mereka mampu membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pencari nafkah utama keluarga dan bukan hanya sebagai sub-ordinat laki-laki sebagaimana ciri masyarakat yang masih memegang budaya patriarki.

#### 2.4.1. Penguasaan Lahan oleh Migran Perempuan di Desa Panyingkiran

Panyingkiran merupakan sebuah desa diantara 13 desa yang masuk Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang-Jawa Barat. Jarak dari Kota Karawang ke Panyingkiran hanya 14 km, dengan jalan raya beraspal yang relatif mulus. Desa ini mudah dijangkau kendaraan roda empat. Angkutan umum yang melayani Karawang - Panyingkiran berupa angkutan perkotaan menyebabkan mobilitas penduduk, barang dan jasa dari desa ke kota dan sebaliknya sangat lancar. Setiap hari dari Panyingkiran diangkut berbagai komoditas hasil pertanian seperti beras, berbagai sayuran, ayam, bebek yang dijual ke pasar besar di Kota Karawang.

Luas wilayah desa hanya sekitar 368 hektar, sebagian besar merupakan lahan sawah dengan irigasi yang baik. Penduduk Panyingkiran hampir semuanya dari etnis Sunda dengan penggunaan Bahasa Sunda dialek pesisiran Karawang yang khas. Hanya terdapat enam orang yang berasal dari etnis Jawa, dan dua orang beretnis Madura. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan komoditas utama padi sawah. Suatu hal yang cukup ironis, dari 1.596 kepala keluarga (KK) yang bermata pencaharian sebagai petani, hanya 488 KK

atau hanya 31 persen petani yang memiliki lahan pertanian, sedangkan 1.108 KK atau lebih dari 69 persen merupakan petani tunakisma (*landlessness*) yang kehidupan sehari-hari menggantungkan hidup dari berburuh di sektor pertanian dan non pertanian.

Tanda-tanda polarisasi penguasaan lahan pertanian kepada segelintir petani kaya sangat terlihat di Panyingkiran. Terdapat 368 KK yang memiliki lahan pertanian kurang dari 1 hektar, sebanyak 112 keluarga memiliki lahan pertanian antara 1-5 hektar, 6 KK yang memiliki lahan pertanian dengan luas 5-10 hektar, dan hanya terdapat 2 KK yang memiliki lahan pertanian dengan luas lebih dari 10 hektar. Kondisi ketimpangan dalam pemilikan lahan diperparah dengan adanya tanah guntai (*absentee*) yaitu tanah yang dimiliki oleh penduduk di luar Desa Panyingkiran. 52 hektar sawah di Desa Panyingkiran dimiliki oleh 7 orang "luar" desa. Mereka berasal dari kecamatan lain di luar Kabupaten Karawang yang umumnya membeli sawah dari penduduk Panyingkiran karena sawah di daerah asal mereka tergusur oleh kawasan industri.

Bagi buruh migran dan keluarganya, memiliki lahan terutama sawah merupakan suatu simbol keberhasilan yang bisa menaikkan status sosial ekonomi keluarga

mereka di desa asal. Lahan pertanian juga merupakan bekal untuk kehidupan keluarga mereka sehari-hari, sebagai persiapan manakala buruh migran sudah

tidak bekerja lagi di luar negeri. Luas dan tahun pembelian lahan oleh buruh migran perempuan di Desa Panyingkiran bisa diperhatikan pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa Panyingkiran**

No Responden	Jenis Lahan Yang Dibeli		
	Lahan sawah (luas)	Lahan darat (luas)	Tahun Pembelian
1	23.000 m <sup>2</sup>	400 m	2004,2006,2007
2	4000 m	675 m	2004
3	4000 m	400 m <sup>2</sup>	2006
4	4000 m	-	2004
5	-	-	
6	-	250 m	2006
7	6500 m	100 m 500 m,	2005
8	3000 m	700 m, 700 m	1999
9	2500 m, 10000 m,10000 m	4000 m	1995, 1991, 2002, 2006 1995,1997,2005, 2006
10	2500 m	200 m	2002, 2007
11	-	400 m	2003
12	5000 m	250 m	2008, 2003
13	5000 m	-	2005
14	4000 m	600 m	2004, 2006
15	2000 m	-	2009
16	-	250 m	2008
17	6500 m	100 m	2005, 2000

*Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010*

Salah seorang mantan buruh migran internasional dari Desa Panyingkiran yang cukup berhasil, yaitu N.Yt (32 tahun) berpendapat bahwa kondisi orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani dan bekerja sebagai bujang pada keluarga petani kaya di desanya yang mendorong dia bolak balik bekerja menjadi pembantu di Arab, dan hasilnya saat ini N.Yt bisa membeli beberapa hektar sawah yang digarap oleh orang tuanya.

Menurut penuturan N.Yt (36 tahun):

“Saya berangkat ke Arab pada tahun 1994, waktu itu saya baru lulus SD dua tahun sebelumnya. Bapak yang sehari-hari menjadi buruh (bubujang) pada keluarga H.Slh di Kampung Panyingkiran, kehidupan keluarga saya betul-betul serba kekurangan karena Bapak harus menghidupi 3 orang anak dan Ibu bekerja membantu Bapak sebagai buruh tani. Saya memiliki keinginan membeli sawah agar Bapak bisa bekerja sendiri tanpa harus menjadi bujang keluarga lain, Alhamdulillah hasil bekerja bertahun-tahun bisa dibelikan 2 hektar sawah dan sebagian bisa saya jadikan modal berdagang kecil-kecilan di kampung”. (Wawancara,12/2/2010).

Hal yang sama dialami oleh ITA (36 tahun) yang merupakan mantan buruh migran yang dianggap paling berhasil di Desa Panyingkiran, dia berasal dari keluarga lapisan bawah. Bapak ITA seorang penjaga/pesuruh SD di Panyingkiran, tetapi berkat keinginan

yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga mereka, ITA yang berhasil menamatkan sekolah sampai jenjang SMA bisa bekerja di Arab selama belasan tahun. Hasil kerja kerasnya bisa memodali keluarga mereka untuk membuka toko sarana produksi pertanian, (saprotan), membeli kendaraan bak terbuka untuk mengangkut gabah hasil panen, dan membeli beberapa hektar tanah darat dan sawah. Saat ini ITA bisa dikatakan sebagai “juragan” atau *patron* di kampungnya. Untuk membantu menggarap sawah dan berjualan, ITA dibantu beberapa orang buruh yang bekerja tetap.

#### **2.4.2. Penguasaan Lahan Oleh Migran Di Desa Ciherang**

Kondisi geografis yang berbukit-bukit menyebabkan Ciherang merupakan desa tipe pertanian campuran antara pesawahan dengan pertanian lahan kering. Ciherang terletak di bagian Selatan Kabupaten Purwakarta. Secara administratif Desa Ciherang termasuk ke dalam Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Ciherang terletak hanya sekitar 7 kilometer dari Kota Purwakarta sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Penduduk Desa Ciherang sebanyak 3.773 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.943 jiwa, perempuan 1.830 jiwa. Seperti halnya desa-desa lain di Jawa

Barat, sebagian besar penduduk Desa Ciherang masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Dari 1.255 kepala keluarga (KK) sebanyak 655 KK bermata pencaharian sebagai petani, yang terdiri dari petani pemilik lahan sebanyak 432 KK, dan petani tunakisma 233 KK. Petani tunakisma umumnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh bangunan yang bekerja di kota sekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bahkan sampai Pulau Sumatera.

Banyaknya perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian desa. Sebagai salah satunya adalah semakin naiknya harga lahan di Desa Ciherang. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2007 terjadi 6 kali pembelian lahan oleh migran perempuan, berupa 3 kali pembelian tanah darat, dan 3 kali pembelian sawah. Luas lahan yang dibeli masing-masing untuk tanah darat 104 m, 133 m, dan 353 m. Sedangkan untuk tanah sawah masing masing 1.077 m, 1.212 m, dan yang terluas hanya 1.220 m. Harga yang dilepas oleh penjual berkisar dari Rp 5 juta – Rp 10 juta untuk tanah darat, dan Rp. 15 juta – Rp 24,5 juta untuk tanah sawah.

Menurut informan kunci, harga lahan di Ciherang melonjak tinggi terutama pada awal terjadi krisis moneter yaitu tahun 1997-1998 dimana banyak buruh migran di Ciherang berani membeli lahan dengan harga tinggi. Hal ini sebagai dampak langsung dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap uang asing khususnya real Arab Saudi. Sebagai gambaran, sebelum krisis moneter menimpa Indonesia, harga lahan di Desa Ciherang untuk tanah darat Rp 20.000 per meter persegi, dan tanah sawah Rp 30.000 per meter persegi. Tahun 2011 harga jual tanah melonjak 100 persen. Tanah sawah saat ini Rp 250.000 – Rp. 350.000 per meter persegi, sedangkan harga tanah darat antara Rp 200.000 – Rp 250.000 per meter persegi. . Harga tanah sawah akan lebih mahal apabila letaknya dekat sumber air irigasi, sedangkan tanah darat memiliki harga yang tinggi apabila dekat dengan jalan.

Sejak tahun-tahun tersebut harga lahan di Ciherang sampai sekarang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tabel 2 di bawah menggambarkan lahan yang diperjual belikan rata-rata dalam ukuran yang sempit yang memberikan gambaran bahwa telah terjadi fragmentasi kepemilikan lahan di pedesaan. Dari perspektif lain menunjukkan pula bahwa lahan sebagai sumber kehidupan bagi

masyarakat pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani merupakan modal sekaligus *saving* dimana dalam keluarga mengalami kondisi sulit, lahan bisa bisa dengan cepat diperjualbelikan.

Lahan terluas yang mampu di beli migran perempuan yang berasal dari Desa Panyingkiran, yaitu seluas lebih dari 2 hektar lebih untuk lahan sawah, dan 4000 meter persegi untuk lahan darat, sedangkan

di Desa Ciherang lahan yang mampu dibeli migran perempuan paling luas 2 hektar untuk lahan sawah, dan 300 meter untuk lahan darat. Kondisi di atas jelas menyiratkan suatu optimisme bahwa menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri terbukti bisa meningkatkan taraf kehidupan, menaikkan status sosial keluarga sekaligus kesejahteraan komunitas sekitarnya.

**Tabel 2.**  
**Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa Ciherang**

No Responden	Lahan sawah (luas)	Jenis Lahan Yang Dibeli	
		Lahan darat (luas)	Tahun Pembelian
1	-	84 m <sup>2</sup> (7x12 m <sup>2</sup> )	2008
2	1000 m <sup>2</sup>	112 m <sup>2</sup> (7x16 m <sup>2</sup> )	2009
3	1000 m <sup>2</sup>	-	1987
4	400 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	2009
5	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	2000
6	120 m <sup>2</sup>	-	1999
7	5000 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup> dan 90 m <sup>2</sup>	2007
8	5000 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup> (15x12m <sup>2</sup> )	2007
9	3000 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup> (15x20m <sup>2</sup> )	1986
10	-	77 m <sup>2</sup> (7x11 m <sup>2</sup> )	1995
11	1000 m <sup>2</sup>	-	1995
12	800 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> (10x20 m <sup>2</sup> )	2009
13	-	-	2008
14	2 hektar	100 m <sup>2</sup>	1998, 2000,2005,2007
15	-	120 m <sup>2</sup>	1993

*Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010*

Dari penuturan beberapa responden yang berhasil membeli lahan pertanian terungkap bahwa masa lalu mereka yang umumnya berasal dari keluarga lapisan bawah di desanya, menjadi pendorong yang kuat untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi keluarga. Berikut petikan ungkapan dari Hj. Msryh (60 Tahun) yang bekerja di Arab Saudi lebih dari 21 tahun:

“..... Saya bekerja keras hampir dua puluh satu tahun menjadi pembantu di Arab, niatnya hanya untuk kehidupan keempat orang anak saya yang sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya. Alhamdulillah sekarang semua anak saya sudah saya bekali dengan sawah dan tanah darat meskipun luasnya tidak seberapa, sekarang kehidupan saya sudah tenang karena semua anak sudah berumah tangga dan saya sekarang sudah tinggal beribadah dan ikut tolab (pengajian) yang diadakan di kampung saya.....”.  
(Wawancara,15/12/2010)

Hj. Bdryh (43 tahun) yang bekerja selama lebih dari 8 tahun di Arab Saudi mengungkapkan hal yang kurang lebih sama dengan Hj. Msryh. Menurut pengakuan Hj. Bdryh:

“Pada tahun 1992 saya berangkat ke negara Arab dengan meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Keberangkatan saya atas kesepakatan dan restu suami, bahkan modal untuk keberangkatan dari hasil penjualan sawah milik suami. Sawah yang luasnya tidak seberapa dijual seharga Rp 190.000 kepada saudara dekat, dan hasil penjualan tersebut masih

kurang untuk berbagai biaya keberangkatan, akhirnya saya meminjam kepada H. Engkon (sponsor/calor) yang memberangkatkan saya. Pinjaman tersebut dibayar setelah saya beberapa bulan bekerja di Arab.”  
(Wawancara,14/12/2010)

Kondisi kemiskinan yang dialami keluarga Badriyah, terbatasnya lapangan pekerjaan di Desa Ciherang serta terbukanya kesempatan menjadi tenaga pembantu di Arab Saudi mendorong semangat Bdryh untuk terus bolak-balik bekerja di Arab, apalagi selama bekerja di sana, dia belum pernah mendapat kesulitan yang berarti. Menurut pengakuan Bdryh, semua majikannya “cukup baik”. Godaan justru datang dari pihak suami yang bertahun-tahun ditinggal Bdryh. Suami Bdryh beberapa kali terdengar selingkuh dengan tetangganya sendiri. Menanggapi masalah ini Bdryh berpendapat:

“Selama saya bekerja di Arab hanya sempat pulang 3 kali, saya mendapat laporan dari saudara suami yang juga bekerja di Arab bahwa suami saya bermain-main dengan perempuan lain. Bagi saya itu sangat menyakitkan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena perbuatan suami dosanya juga harus ditanggung oleh dia sendiri. Bagi saya yang terpenting kedua anak saya, hal ini mengingat anak yang mulai besar dan perlu biaya untuk bersekolah, apalagi anak pertama saya mempunyai kelainan pendengaran (tuna rungu) sejak lahir, hal ini memerlukan biaya besar karena bersekolah di SLB”  
(Wawancara,14/12/2010).

Berkat kegigihan Bdryh bekerja di Arab, dia mampu membeli 4.060 meter sawah dan 268 meter tanah darat. Pembelian sawah dari empat orang saudara dan tetangganya. Pembelian sawah yang pertama seluas 2.000 meter seharga Rp 55 juta, pembelian kedua seluas 680 meter seharga Rp 27,5 juta, pembelian ketiga seluas 700 meter seharga Rp 32 juta, pembelian terakhir seluas 680 meter seharga Rp 30 juta. Sedangkan tanah darat yang dibeli Bdryh adalah 170 meter seharga Rp.4,75 juta, tanah tersebut dibeli dari adik ipar Bdry. Saat ini tanah tersebut dipakai rumah keluarga Bdryh yang cukup luas dan mewah untuk ukuran di pedesaan. Pembelian kedua seluas 98 meter tanah darat yang terletak di depan Balai Desa Ciherang, dengan harga Rp. 10 juta. Semua pembelian lahan atas nama suami Bdryh, karena dia percaya sepenuhnya kepada suaminya, dan seperti itulah sikap yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri.

Keberhasilan migran untuk menguasai lahan di kampung halaman terjadi secara bertahap dan umumnya mereka mampu membeli lahan di desanya setelah bekerja bolak-balik ke luar negeri berkali-kali atau apa yang dinamakan *yo-yo migration*. Terdapat pola yang umum terjadi bahwa pada tahun pertama dan kedua bekerja di luar negeri, migran hanya mampu

mengirim uang ke pada keluarga dalam jumlah yang terbatas. Hal ini karena uang gaji mereka sebagian dipotong untuk membayar hutang-hutang kepada sponsor atau calo yang mengirim mereka. Pada kepergian kedua atau ketiga, uang kiriman kepada keluarga di kampung halaman biasanya digunakan untuk memperbaiki, membangun rumah atau membeli kendaraan roda dua. Pada kepergian berikutnya, beberapa migran mulai ada yang mampu membeli, menyewa, dan menggadai lahan pertanian di desa masing-masing. Fenomena yang cukup menarik dalam pembelian lahan.

*Pertama*, bagi migran yang belum berkeluarga, pembelian lahan tersebut dilakukan oleh orang tua, dan lahan yang dibeli sebagian besar atas nama mereka sendiri. Meskipun pada saat transaksi jual beli mereka sedang berada di luar negeri, mereka mengaku sangat percaya kepada orang tuanya, *Kedua*, bagi migran perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga atau istri, terdapat kehati-hatian dalam membeli lahan. Dalam kondisi suami “tidak bisa dipercaya”, pembelian lahan dilakukan ketika migran pulang kampung atau pembelian dilakukan oleh bapak dari migran perempuan. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik antara mertua dan menantu,

menantu merasa statusnya sebagai suami tidak dihargai. Sedangkan bagi migran yang memiliki suami “bisa dipercaya” pembelian lahan dilakukan oleh suami mereka atas nama istri atau atas maupun atas nama suami sendiri.

### III. PENUTUP

Mengalirnya buruh migran internasional perempuan dari pedesaan di Jawa Barat dan Indonesia masih akan terus berlangsung selama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia belum dibenahi dan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal ini sebagai akibat dari saling terkaitnya faktor; kemiskinan, penguasaan lahan, kurangnya lapangan kerja di pedesaan, dan terbukanya kesempatan menjadi buruh migran di luar negeri, khususnya di Negara Arab Saudi. Besarnya resiko yang harus dihadapi migran internasional perempuan sebelum keberangkatan, di negara tujuan dan saat kembali ke daerah asal seperti pemalsuan berbagai dokumen keberangkatan, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan fisik yang dalam beberapa kasus berakhir dengan kematian, tidak pernah mampu menyurutkan minat perempuan pedesaan untuk memutuskan bekerja di luar negeri.

Salah satu motif migran perempuan adalah memperbaiki status sosial ekonomi keluarga mereka dengan salah satu indikator menguasai lahan pertanian (tanah darat dan sawah) disamping keinginan untuk memiliki rumah yang bagus, kendaraan roda dua. Ketertarikan migran untuk menguasai lahan dengan alasan: (1) mereka berasal dari keluarga miskin yang merupakan lapisan terbawah di pedesaan; (2) mata pencaharian keluarga sebagai buruh tani dan petani tanpa lahan (*landlessnes*); (3) pekerjaan migran sebelum berangkat ke luar negeri adalah sebagai buruh tani, menganggur dan sebagai ibu rumah tangga; (4) lahan pertanian merupakan simbol status sosial bagi masyarakat pedesaan; (5) lahan merupakan *saving* sekaligus bekal masa depan ketika buruh migran sudah tidak mampu lagi bekerja di luar negeri; dan (6) pemilikan lahan juga menjadi modal ketika seseorang meninggal dunia, dan menjadi ukuran dalam upacara “*ngamumule atau mulasara*” (rangkaian upacara kematian).

Moratorium untuk menghentikan pengiriman sementara buruh migran perempuan khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia hanya merupakan langkah sementara dan belum menjadi solusi pemecahan masalah yang cukup kompleks dibidang ketenagakerjaan. Dengan

demikian diperlukan tindakan serius dari pemerintah dan para pelaku (*stakeholders*) yang terkait dengan pengiriman buruh migran perempuan ke luar negeri untuk melindungi warga Negara Indonesia yang sering disebut sebagai pahlawan devisa. Pihak terkait seperti sponsor/calo, PJTKI, BNP2TKI, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara terus menerus perlu diawasi berbagai pihak seperti NGO/LSM, pers, perguruan tinggi agar pelaksanaan pengiriman buruh migran internasional semakin baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Childress, Malcolm, Cornkiel-Lastarria, Susan, *Gender In Agriculture. Source Book*, The World Bank-Food and Agricultural Organizational-International Food for Agricultural Development. 2009. The International Book for Reconstructional Development/The World Bank. 1818 H Street, NW. Washington DC 20433, 2009.
- Ellis, Frank, *Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Haris, Abdul, *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (Jejak Migran Dalam Pembangunan Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- , "Migrasi Internasional, Jaminan Perlindungan dan Tantangan Ekonomi Global", dalam *Jurnal POPULASI*, Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2001. Jogjakarta : PPSK UGM, 2001.
- Hugo, Graeme, "International Labor Migration and Family: Some Observation from Indonesia", *Asian and Pacific Migration Journal* 4(2-3): 273-301, 1995.
- Kolopaking, Lala, M., "Penghijrahan Buruh Ke Malaysia dari Sisi Pembangunan Daerah Asal di Jawa", dalam *Mimbar Sosek: Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian*, Volume 13 Nomor 1 : April 2000. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Koser, Khalid, *International Migration: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2007.
- Mabogunje, A.L., "System Approach to A theory of Rural Urban Migration", in *Geographical Analysis*, 2:1-8, 1970.
- Mantra, Ida Bagoes, Kasto, Abdul Haris, *Mobilitas Pekerja Perempuan Indonesia Ke Arab Saudi: Masalah Kekerasan Dan Perlindungan Hukum, Kasus Di Kabupaten Cilacap*, Yogyakarta. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Massey, D., et.al., "Theories of international Migration: a review and appraisal", *Population and Development Review*, 19 (3): 431-466, 1993.

- Rahmawati, Siti, "Dampak Mobilitas Pekerja Ke Sabah-Malaysia Terhadap Rumah Tangga Migran Di Daerah Asal", dalam *Majalah Geografi Indonesia*, Volume 15, No 2, September 2001. Halaman 119-131, 2001.
- Setiadi, "Migrasi Perempuan: Respons Lokal dan Alternatif Kebijakan", dalam Faturohman, Bambang Wicaksono, Setiadi, Syahbudin Latief (editor), *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM. Jogjakarta, 2004.
- Todaro, M.P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terj. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Tjiptoherijanto, P., *International Migration: Process, System and Policy Issue*, Presented in A Workshop on International Migration at The Population Studies Centre Gadjah Mada University. Yogyakarta, 1998.
- Tjondronegoro, Sediono M.P., *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*, Penyunting: M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga Kerjasama dengan Lab. Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan Faperta IPB, 1999.
- Tukiran, Abdul Haris, Pande Made Kutaneegara, Setiadi, *Mobilitas Penduduk Indonesia, Tinjauan Lintas Disiplin*, Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Wahyuni, Ekawati, Sri, *The Impact of Migration Upon Family Structure and Functioning in Java*, Thesis Submitted in Fulfillment of Requirements the Doctor of Philosophy Degree in Population and Human Resources, Department of Geography The University of Adelaide, Australia, 2000.
- Wood, Charles H., *Equilibrium and Historical Perspectives on Migration*, IMR. Volume 16 No.2, 1982.
- Zid, Muhammad, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional Perempuan Dan Penguasaan Lahan Pedesaan. Kasus Desa Pengirim Migran Internasional Dari Pedesaan Kabupaten Karawang dan Purwakarta Jawa Barat*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penelitian RUBI Dengan Dukungan Dana DIPA UNJ Tahun 2010.